



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. Pahlawan No. 1 Painan

Telp/Fax. (0756) 21601 | Pos. El.: Inspektoratpessel@yahoo.co.id.

LAPORAN HASIL REVIU

Laporan Kinerja (LKj)

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Anggaran 2025

Nomor : 700.1.2.8/366/INSP/2026

Tanggal : 12 Maret 2026





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKj DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 12 Maret 2026

Inspektur,



Evafauza Yuliasman, S.E., MSi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670712 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln.Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

Nomor : 700.1.2.8/366/INSP/2026 Painan, 12 Maret 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan

Yth. Bupati Pesisir Selatan

di

Painan

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) adalah penyajian manajemen dan substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 Maret 2026 (tiga hari kerja) sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.8.6.3/38/INSP/2026 tanggal 27 Februari 2026.

Reviu bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja perangkat daerah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Ruang lingkup pelaksanaan reviu yaitu reviu dilakukan terhadap metode pengumpulan data/informasi untuk menguji keandalan dan akurasi data dan informasi kinerja. Reviu dilakukan atas keselarasan perencanaan strategis antar tingkat di dalam perangkat daerah, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan atas Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Berdasarkan hasil pengujian atas kelengkapan dokumen reuiu Laporan Kinerja (LKj) ditemui dokumen LKj belum dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Matriks tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun sebelumnya.
- b. Pengukuran kinerja kepala OPD Tahun 2025.
- c. Form keselarasan anggaran.
- d. *Crosscutting* (jika ada).

2. Pengujian atas kesesuaian outline LKj Perangkat Daerah dengan standar pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian outline LKj Perangkat Daerah dengan standar Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada BAB II belum menyajikan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- b. Pada Laporan Kinerja belum melampirkan Perjanjian Kinerja Individu.

3. Pengujian atas kesesuaian tujuan sasaran pada LKj OPD dengan Renstra dan PK tahun 2025

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian tujuan sasaran pada LKj OPD dengan renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan tidak ada dalam PK.
- b. Indikator tujuan tidak ada dalam Renstra, PK maupun LKj.

4. Pengujian atas kesesuaian target kinerja pada LKj dengan target pada Renstra dan PK tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian target kinerja pada LKj dengan Target pada Renstra dan PK Tahun 2025 ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Cara penetapan target indikator kinerja pada LKj telah mengacu pada target kinerja dalam Renstra OPD dan PK OPD untuk indikator "Nilai AKIP

Perangkat Daerah" dan "Indeks Pemanfaatan Arsip". Namun, hal tersebut belum berlaku untuk indikator "Meningkatkan Literasi Masyarakat" dan "Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah".

- b. LKj sudah menyajikan cara menetapkan target.
 - c. Seluruh target kinerja yang dimuat pada dokumen PK telah disajikan dalam LKj namun ada target yang tidak sesuai dengan dokumen Renstra, yaitu target pada indikator kinerja "Meningkatkan Literasi Masyarakat" dan "Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah".
5. Pengujian atas kesesuaian capaian kinerja dengan data kinerja secara rinci/analisa yang memadai dalam LKj.

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian capaian kinerja dengan data kinerja dan telah diuraikan secara rinci/analisa yang memadai dalam LKj ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. LKj sudah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan.
 - b. LKj sudah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra.
 - c. Sasaran dan indikator kinerja pada meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan indeks pemanfaatan arsip; meningkatnya kualitas inovasi daerah dan nilai kematangan inovasi PD belum dilengkapi dengan dokumen pendukung sehingga tidak bisa diyakini kebenaran perhitungan realisasi.
 - d. Perhitungan persentase capaian kinerja telah sesuai.
 - e. Seluruh tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah memuat capaian kinerja dan telah memuat analisa yang memadai.
6. Pengujian atas kelengkapan penyajian LKj OPD dengan data pembanding yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil pengujian atas penyajian LKj OPD dengan data pembanding yang dibutuhkan, ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a. LKj telah menyajikan analisis data pembanding target, realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir secara memadai.
- b. LKj telah menyajikan analisis data pembanding realisasi kinerja dengan target jangka menengah/renstra secara memadai.
- c. LKj telah menyajikan informasi data pembanding dengan kinerja Nasional/Regional/Provinsi/Kabupaten/Kota dengan indikator yang sama (*benchmark* kinerja).

7. Pengujian atas penyajian analisa penyebab keberhasilan/kegagalan Dalam LKj. Berdasarkan hasil pengujian atas penyajian analisa penyebab keberhasilan/kegagalan ditemui hal sebagai berikut:

LKj telah menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

8. Pengujian atas penyajian efisiensi penggunaan sumber daya pada LKj.

Berdasarkan hasil pengujian atas penyajian efisiensi penggunaan sumber daya pada LKj ditemui hal sebagai berikut:

LKj telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator kinerja, namun perhitungan efisiensi terhadap capaian kinerja belum memadai.

Perhitungan efisiensi yang disajikan pada LKj menggunakan perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan efisiensi kinerja yang mempertimbangkan capaian output sebagaimana konsep pengukuran efisiensi kinerja anggaran berdasarkan PMK Nomor 214 /PMK.02/2017.

9. Pengujian atas penyajian realisasi anggaran.

Berdasarkan hasil pengujian atas penyajian realisasi anggaran ditemui sebagai berikut:

LKj sudah menyajikan informasi realiasi anggaran yang terkait dengan capaian kinerja.

10. Pengujian atas tindak lanjut atas rekomendasi APIP atas kelemahan LKj tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengujian tindak lanjut atas rekomendasi APIP atas kelemahan LKj tahun 2024 ditemui hal sebagai berikut:

LHE Nomor 700.1.2.1/838/Insp-PS/2025 belum ada ditindaklanjuti yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

a. Dalam merumuskan indikator kinerja "Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah" agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevan and Time-bound), menjadikan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar dalam merumuskan target dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai (achievable).

b. Melakukan monitoring atas capaian rencana aksi secara optimal, tertib administrasi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan monitoring dalam bentuk notulen dan daftar hadir peserta rapat, memuat informasi tentang

pemantauan kemajuan rencana aksi atas capaian target secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran) dan solusi yang dilakukan jika terdapat deviasi. Memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan pengukuran kinerja atas realisasi rencana aksi secara berkala per triwulan dan membuat notulen hasil monitoring pencapaian kinerja/realisasi rencana aksi yang memuat target, realisasi, capaian, hambatan dan saran/solusi perbaikan kedepan untuk masing-masing indikator kinerja.
- b. Melibatkan seluruh staf/individu dalam pemantauan capaian kinerja pada monitoring rencana aksi secara berkala per triwulan sehingga setiap individu peduli atas capaian dan hasil pengukuran kinerja unit dan kinerja individu, serta melampirkan notulen dan daftar hadir rapat monev dimaksud.

3. Pelaporan Kinerja

Melakukan perhitungan tingkat efisiensi sumber daya secara memadai dengan memperhitungkan antara anggaran, realisasi anggaran dan capaian keluaran.

4. Evaluasi Kinerja

- a. Membuat laporan evaluasi kinerja internal dengan pendalaman secara memadai yang menyajikan informasi target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan dan rekomendasi/saran perbaikan.
- b. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHE AKIP Internal untuk perbaikan implementasi SAKIP pada tahun berikutnya.
- c. Meningkatkan implementasi SAKIP dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP PD sehingga nilai sakip tahun berikut lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Disarankan kepada Bupati Pesisir Selatan agar memerintahkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Melengkapi dokumen pendukung LKj sebagai berikut:

- a. Matriks tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun sebelumnya
- b. Pengukuran Kinerja Kepala OPD Tahun 2025
- c. Form keselarasan anggaran

d. *Crosscutting* (jika ada)

2. Pada outline LKj agar melengkapi penyajian sebagai berikut:
 - a. Pada BAB II agar menyajikan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
 - b. Pada Laporan Kinerja agar melampirkan Perjanjian Kinerja Individu
3. Dokumen Renstra, PK dan LKj diselaraskan dalam menetapkan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, sasaran strategis, dan indikator kinerja sebagai berikut.
 - a. Agar menentukan tujuan pada PK diselaraskan dengan tujuan Renstra.
 - b. Agar indikator tujuan disajikan dalam Renstra, PK dan LKj.
4. Pengujian atas kesesuaian target kinerja pada LKj dengan target pada Renstra dan PK Tahun 2025 sebagai berikut:

Dalam membuat target indikator kinerja "Meningkatkan Literasi Masyarakat" dan "Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah" pada dokumen LKj agar mengacu dan menyelaraskannya dengan target indikator kinerja yang ada di dalam dokumen renstra dan dokumen PK OPD. Jika terdapat perbedaan agar diberikan penjelasannya secara memadai pada dokumen LKj Bab II.
5. Kesesuaian capaian kinerja pada LKj dengan data kinerja sebagai berikut:

Agar melengkapi LKj dengan menyajikan informasi sumber data pendukung atas realisasi kinerja sesuai dengan sumber data yang telah ditetapkan pada IKU.
6. Agar menyajikan pada LKj perhitungan efisiensi atas capaian kinerja berdasarkan PMK Nomor 214 /PMK.02/2017.
7. Agar menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Nomor 700.1.2.1/838/Insp-PS/2025 Tahun 2024 pada LKj 2025.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

Demikian hasil Reviu ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur,




Evafauza Yuliasman, S.E., MSi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670712 199202 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

**CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KONDISI/PERMASALAHAN	KONDISI SEHARUSNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	<p>Reviu terhadap dokumen pendukung LKj belum lengkap. Berdasarkan hasil pengujian atas kelengkapan dokumen reviu Laporan Kinerja (LKj) ditemui Dokumen LKj belum dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun sebelumnya. 2. Pengukuran Kinerja Kepala OPD Tahun 2025. 3. Form keselarasan anggaran. 4. Crosscutting (jika ada). 	<p>Reviu LKj dilengkapi dengan dokumen pendukung yang digunakan untuk penyusunan LKj Perangkat Daerah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Perangkat Daerah. 2. RKT 2025 3. IKU OPD 4. Dokumen Penjelasan IK Ka OPD 5. PK Ka OPD dan pejabat lainnya 6. Laporan Kinerja Tahun 2025 7. Data Dukung Capaian Kinerja yang disajikan dalam LKj OPD. 8. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Th sebelumnya 9. Rencana Aksi Ka OPD Tahun 2025 10. Realisasi Rencana Aksi Kepala OPD Tahun 2025 (Tw I s.d. IV) 11. Pengukuran Kinerja Kepala OPD Tahun 2025 12.a Form Rekap DPA 2.2. SKPD TA 2025 12.b Form keselarasan anggaran 13.a Cascading Tahun 2025 13.b Crosscutting (jika ada) 14. Surat Penyampaian LKj ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pesisir Selatan beserta tanda terima 15. Dokumen bukti dukung penghargaan yang diperoleh pada tahun 2025 	<p>Agar melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun sebelumnya. 2. Pengukuran Kinerja Kepala OPD Tahun 2025. 3. Form keselarasan anggaran. 4. Crosscutting (jika ada). 	<p>Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti</p>
2	<p>Pengujian atas Kesesuaian Outline LKj Perangkat Daerah dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p>			

a.	Outline pada BAB I telah sesuai.	Outline BAB I: BAB I Pendahuluan 1. Gambaran Umum Organisasi 2. Aspek Strategic Organisasi 3. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi	-	-
b.	Outline pada BAB II telah sesuai.	outline BAB II: BAB II Perencanaan Kinerja uraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.	-	-
c.	Outline pada BAB III belum menyajikan informasi membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. (dua tahun terakhir)	outline BAB III: BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. (dua tahun terakhir) 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan kinerja nasional, provinsi atau kabupaten/kota lainnya (benchmark kinerja). 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	Agar melengkapi BAB III dengan penyajian informasi membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. (dua tahun terakhir)	Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.

	<p>B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.</p>	<p>Pada Lampiran: Agar melampirkan Dokumen Perjanjian Kinerja Individu</p>	<p>Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.</p>
<p>3</p>	<p>PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TUJUAN SASARAN PADA LKJ OPD DENGAN RENSTRA DAN PK TAHUN 2025</p>	<p>Pada Lampiran: Lampiran Perjanjian Kinerja Individu</p>	<p>Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.</p>
<p>1. Tujuan tidak ada dalam PK. 2. Indikator Tujuan tidak ada dalam Renstra, PK maupun LKj.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antara dokumen Renstra, PK dan LKj selaras dalam menetapkan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja. Jika terjadi perbedaan, agar disertakan dengan penjelasan yang memadai. • Seluruh tujuan, sasaran pada PK disajikan dalam LKj OPD 	<p>1. Agar menentukan tujuan pada PK diselaraskan dengan tujuan Renstra. 2. Agar Indikator tujuan disajikan dalam Renstra, PK dan LKj.</p>	<p>Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.</p>
<p>4</p>	<p>PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TARGET KINERJA PADA LKJ DENGAN TARGET PADA PK dan RENSTRA TAHUN 2025</p>	<p>1. Antara dokumen Renstra, PK dan LKj selaras dalam menetapkan Target Kinerja. Jika terjadi perbedaan, agar disertakan dengan penjelasan yang memadai. 2. Pada LKj memuat cara dalam menetapkan Target. 3. Seluruh target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen PK disajikan dalam LKj.</p>	<p>1. Dalam membuat target indikator kinerja pada dokumen LKj agar mengacu dan menyelarasannya dengan target indikator kinerja yang ada di dalam dokumen Renstra dan dokumen PK OPD. Jika terdapat perbedaan agar diberikan penjelasannya secara memadai pada dokumen LKj Bab II.</p>
<p>1. Cara penetapan target indikator kinerja pada LKj telah mengacu pada target kinerja dalam Renstra OPD dan PK OPD untuk indikator "Nilai AKIP Peringkat Daerah" dan "Indeks Pemanfaatan Arsip". Namun, hal tersebut belum berlaku untuk indikator "Meningkatkan Literasi Masyarakat" dan "Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah". 2. LKj sudah menyajikan cara menetapkan target. 3. Seluruh target kinerja yang dimuat pada dokumen PK telah disajikan dalam LKj namun ada target yang tidak sesuai dengan dokumen Renstra, yaitu target pada indikator kinerja "Meningkatkan Literasi Masyarakat" dan "Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah".</p>	<p>1. Cara penetapan target indikator kinerja pada LKj telah mengacu pada target kinerja dalam Renstra OPD dan PK OPD untuk indikator "Nilai AKIP Peringkat Daerah" dan "Indeks Pemanfaatan Arsip". Namun, hal tersebut belum berlaku untuk indikator "Meningkatkan Literasi Masyarakat" dan "Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah". 2. LKj sudah menyajikan cara menetapkan target. 3. Seluruh target kinerja yang dimuat pada dokumen PK telah disajikan dalam LKj namun ada target yang tidak sesuai dengan dokumen Renstra, yaitu target pada indikator kinerja "Meningkatkan Literasi Masyarakat" dan "Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah".</p>	<p>1. Cara penetapan target indikator kinerja pada LKj telah mengacu pada target kinerja dalam Renstra OPD dan PK OPD untuk indikator "Nilai AKIP Peringkat Daerah" dan "Indeks Pemanfaatan Arsip". Namun, hal tersebut belum berlaku untuk indikator "Meningkatkan Literasi Masyarakat" dan "Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah". 2. LKj sudah menyajikan cara menetapkan target. 3. Seluruh target kinerja yang dimuat pada dokumen PK telah disajikan dalam LKj namun ada target yang tidak sesuai dengan dokumen Renstra, yaitu target pada indikator kinerja "Meningkatkan Literasi Masyarakat" dan "Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah".</p>	<p>Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.</p>

5 PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA DENGAN DATA KINERJA SECARA RINCI/ANALISA YANG MEMADAI DALAM LKJ				
5	<p>1. LKj sudah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan.</p> <p>2. LKj sudah menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra.</p> <p>3. Sasaran dan Indikator Kinerja pada Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah dan Indeks Pemanfaatan Arsip; Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah dan Nilai Kematangan Inovasi PD belum dilengkapi dengan dokumen pendukung sehingga tidak bisa diyakini kebenaran perhitungan realisasi.</p> <p>4. Perhitungan persentase capaian kinerja telah sesuai.</p> <p>5. Seluruh tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah memuat capaian kinerja dan telah memuat analisa yang memadai.</p>	<p>1. LKj menyajikan formula dalam mencapai kinerja dan selaras dengan formula yang ditetapkan dalam IKU.</p> <p>2. LKj menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan.</p> <p>3. LKj menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah/periode renstra.</p> <p>4. LKj menyajikan data dukung (sumber data) atas kinerja yang disajikan.</p> <p>5. Seluruh tujuan, sasaran dan indikator kinerja memuat capaian kinerja dan telah memuat analisa yang memadai</p>	<p>1. Agar mengkapi LKj dengan menyajikan informasi sumber data pendukung atas realisasi kinerja sesuai dengan sumber data yang telah ditetapkan pada IKU.</p>	<p>Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.</p>
6 PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN LKJ OPD DENGAN DATA PEMBANDING YANG DIBUTUHKAN				
6	<p>1. LKj telah menyajikan analisis data pembandingan target, realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir secara memadai.</p> <p>2. LKj telah menyajikan analisis data pembandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah/renstra secara memadai.</p> <p>3. LKj telah menyajikan informasi data pembandingan dengan kinerja nasional/regional/Provinsi/Kabupaten Kota dengan indikator yang sama (benchmark kinerja).</p>	<p>1. LKj menyajikan analisis data pembandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya secara memadai.</p> <p>2. LKj menyajikan analisis data pembandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya (minimal selama periode renstra) secara memadai.</p> <p>3. LKj menyajikan analisis data pembandingan dengan kinerja nasional/regional/Provinsi/Kabupaten Kota dengan indikator yang sama (benchmark kinerja) secara memadai.</p>	<p>Telah sesuai</p>	<p>Telah sesuai</p>
7 PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DALAM LKJ				
7	<p>LKj telah menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.</p>	<p>LKj menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.</p>	<p>Telah sesuai</p>	<p>Telah sesuai</p>

8 PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PADA LKJ

<p>LKj telah menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator kinerja, namun perhitungan efisiensi terhadap capaian kinerja belum memadai. Perhitungan efisiensi yang disajikan pada LKj menggunakan perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan efisiensi kinerja yang mempertimbangkan capaian output sebagaimana konsep pengukuran efisiensi kinerja anggaran berdasarkan PMK Nomor 214 /PMK.02/2017.</p>	<p>LKj menyajikan efisiensi sumber daya untuk seluruh indikator kinerja yang dijanjikan dalam PK OPD</p>	<p>Agar menyajikan pada LKj perhitungan efisiensi atas capaian kinerja berdasarkan PMK Nomor 214 /PMK.02/2017.</p>	<p>Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti</p>
---	--	--	--

9 PENGUJIAN ATAS PENYAJIAN REALISASI ANGGARAN

<p>LKJ sudah menyajikan informasi realisasi anggaran yang terkait dengan capaian kinerja.</p>	<p>LKJ menyajikan realisasi anggaran yang terkait dengan kinerja berdasarkan form keselarasan anggaran</p>	<p>Telah sesuai</p>	<p>Telah sesuai</p>
---	--	---------------------	---------------------

10 PENGUJIAN ATAS TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI APIS ATAS KEKURANGAN LKJ TAHUN SEBELUMNYA

<p>LHE Nomor 700.1.2.1/838/Insp-PS/2025 belum ada ditindaklanjuti yaitu: 1. Perencanaan Kinerja a. Dalam merumuskan indikator kinerja "Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah" agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound), menjadikan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar dalam merumuskan target dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai (achievable). b. Melakukan monitoring atas capaian rencana aksi secara optimal, tertib administrasi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan monitoring dalam bentuk notulen dan daftar hadir peserta rapat, memuat informasi tentang pemantauan</p>	<p>Seluruh rekomendasi untuk perbaikan laporan kinerja tahun sebelumnya ditindaklanjuti dalam LKj OPD tahun 2025 secara optimal.</p>	<p>Agar merencanakan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Nomor 700.1.2.1/838/Insp-PS/2025 Tahun 2024 pada LKj 2025.</p>	<p>Telah dikonfirmasi dan akan ditindaklanjuti.</p>
---	--	---	---

kemajuan rencana aksi atas capaian target secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran) dan solusi yang dilakukan jika terdapat deviasi. Memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan pengukuran kinerja atas realisasi rencana aksi secara berkala per triwulan dan membuat notulen hasil monitoring pencapaian kinerja/realisasi rencana aksi yang memuat target, realisasi, capaian, hambatan dan saran/solusi perbaikan kedepan untuk masing-masing indikator kinerja.
- b. Melibatkan seluruh staf/individu dalam pemantauan capaian kinerja pada monitoring rencana aksi secara berkala per triwulan sehingga setiap individu peduli atas capaian dan hasil pengukuran kinerja unit dan kinerja individu, serta melampirkan notulen dan daftar hadir rapat monev dimaksud.

3. Pelaporan Kinerja

Melakukan perhitungan tingkat efisiensi sumber daya secara memadai dengan memperhitungkan antara anggaran, realisasi anggaran dan capaian keluaran.

4. Evaluasi Kinerja

- a. Membuat laporan evaluasi kinerja internal dengan pendalaman secara memadai yang menyajikan informasi target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan dan rekomendasi/saran perbaikan.
- b. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHE AKIP Internal untuk perbaikan

	<p>implementasi SAKIP pada tahun berikutnya.</p> <p>c. Meningkatkan implementasi SAKIP dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP PD sehingga nilai sakiip tahun berikut lebih baik dibanding tahun sebelumnya.</p>			
--	--	--	--	--

*) Tanggung jawab tim terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, 4 Maret 2026

WAKIL PENANGGUNG JAWAB,



RIO SYANDRA, S.S.T., S.T.

NIP. 19810707 200501 1 010